

## Elaborasi Manajemen Keuangan Dan Implementasi Akuntabilitas Bendahara Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Jayapura

John Agustinus\*

\* Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

### ARTICLE INFO

#### Riwayat Artikel:

Diterima 20 Juni 2024

Disetujui 21 Juli 2024

#### Keywords:

Kinerja Bendahara  
Implementasi Akuntabilitas  
Penyerapan Anggaran

### ABSTRAK

**Abstract :** *The budget has a function as a planning tool and as a control tool. The budget as a planning tool indicates the targets that must be achieved by the government, while the budget as a control tool indicates the allocation of public funding sources. Budget absorption at the Jayapura City Social Service, Papua Province is influenced by the treasurer's performance, implementation of accountability, the better the treasurer's performance and accountability, the better the implementation of budget use. The results of the research show that together the Treasurer Performance and Accountability Implementation variables can have a positive influence on increasing Budget Absorption in the Jayapura City Social Service, Papua Province. Partially, both the Treasurer Performance and Accountability Implementation variables show a significant influence on Budget Absorption at the Jayapura City Social Service, Papua Province. The dominant factor influencing budget absorption at the Jayapura City Social Service, Papua Province is the Treasurer's Performance variable.*

**Abstrak :** Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik. Penyerapan anggaran pada Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua dipengaruhi oleh Kinerja bendahara, Implementasi Akuntabilitas, semakin kinerja bendahara dan akuntabilitas baik maka dalam implementasi penggunaan anggaran semakin baik. Hasil penelitian menunjukkan Secara bersama-sama variabel Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Penyerapan Anggaran pada Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua. Secara parsial baik variabel Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua. Faktor yang dominan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua adalah variabel Kinerja Bendahara.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



#### Alamat Korespondensi :

John Agustinus,

Dosen Program Studi Magister Manajemen,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,

Jl. Beringin Entrop

E-Mail : [johnagustinus@stie-portnumbay.ac.id](mailto:johnagustinus@stie-portnumbay.ac.id)

### PENDAHULUAN

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Anggaran Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja Negara memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura dalam mendukung pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Di Indonesia, lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Fenomena keterlambatan penyerapan anggaran adalah fenomena yang mayoritas dialami oleh instansi publik atau pemerintah. Salah satu analisis adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelola keuangan dan lemahnya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Kelemahan dalam pencapaian target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (BPKP,2011). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi.

Penyerapan anggaran merupakan masalah yang klasikal karena terjadi di setiap tahun anggaran dan sampai saat ini masih sulit untuk ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun hampir merata terjadi di setiap daerah maka sangat wajar jika banyak pihak yang khawatir dengan kondisi penyerapan anggaran APBN. Untuk Pemerintah Kota Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua diperoleh data penyerapan anggaran untuk TA 2020 sampai dengan 2022 di bawah 60%.

Berdasarkan data dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua ditetapkan Standar Penyerapan sebesar 60% pada akhir periode.

**Tabel 1. Alokasi Anggaran pada Tahun 2020 - 2022**

No.	Tahun	Pagu Awal	Perubahan I	Perubahan II	Revisi Penghematan
1.	2020	28.202.402.000	22.253.614.000	18.479.868.000	9.956.118.000
2.	2021	35.042.683.000			31.087.246.000
3.	2022	35.171.788.000			40.564.445.000

Sumber: Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura

Beberapa hal yang dapat terjadi sebagai dampak dari penyerapan anggaran yang lambat adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, kerugian secara ekonomis terhadap keuangan negara dan terhambatnya peluang investasi pemerintah (Hendris, 2012). Tiga hal tersebut di atas berpengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara. Persoalan keterlambatan penyerapan anggaran terjadi di banyak satuan kerja sehingga mempengaruhi rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh satuan kerja.

## TINJAUAN PUSTAKA

Meyulinda Aviana Elim (2018) Dalam Penelitiannya Berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada OPD di Kota Kupang. Sampel penelitian adalah responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatanganan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran pada OPD di Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan alat analisis regresi linear

berganda. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu: Variabel Independen kinerja bendahara ( $X_1$ ) dengan indikator-Indikator perencanaan anggaran ( $X_{1.1}$ ), pelaksanaan anggaran ( $X_{1.2}$ ), pengadaan barang dan jasa ( $X_{1.3}$ ), komitmen manajemen ( $X_{1.4}$ ), lingkungan dan birokrasi ( $X_{1.5}$ ), sedangkan satu variabel dependen adalah penyerapan anggaran (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada OPD di Kota Kupang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anfujatin (2016) dengan judul penelitian analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada SKPD kabupaten Tuban dan hasil penelitian menjelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dominan rendahnya penyerapan anggaran pada SKPD kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015 adalah faktor Sumber Daya Manusia dalam ini adalah kinerja bendahara, dengan presentasi sebesar 54,64%. sedangkan faktor utama dalam Sumber Daya Manusia yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2015 adalah Jumlah SDM yang memiliki sertifikat terbatas sebesar 62,5%., PPK/PPTK melakukan rangkap tugas dalam kegiatan pengadaan barang jasa sebesar 61,8% dan kurangnya perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan sebesar 61,4%.

Menurut Halim (2014:104) Penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas. Penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.

Menurut PMK Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Kapasitas Fiskal Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berperan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Buruknya kualitas penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan.

*Accountability*, adalah sikap dan tindakan dari pembuat keputusan baik di pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. (Halim, 2008: 61).

Ledvina (2009: 59) mengatakan Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten (Meyulinda Aviana Elim, 2018).

Selanjutnya Meyulinda (2018) menjelaskan beberapa Indikator-indikator permasalahan sering terjadi yang menyebabkan penyerapan anggaran adalah keterlambatan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses pencairan, indikator-indikator tersebut dijelaskan berikut ini. **Indikator-indikator Penyerapan Anggaran Sektor Publik meliputi:**

1. *ketertiban dalam pengelolaan uang persediaan,*
2. *tepat waktu pemasukan data kontrak,*
3. *menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Mencairkan (SPM),*
4. *Menghindari Retur SP2D,*
5. *melaksanakan penyerapan sesuai target yang telah di tetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA),*
6. *menghindari/meminimalisir revisi DIPA,*
7. *penyelesaian tagihan tepat waktu,*
8. *tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara,*
9. *membuat perencanaan kas yang baik,*
10. *realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan,*

### 11. penyelesaian terhadap pagu minus belanja pegawai dan menghindari dispensasi SPM.

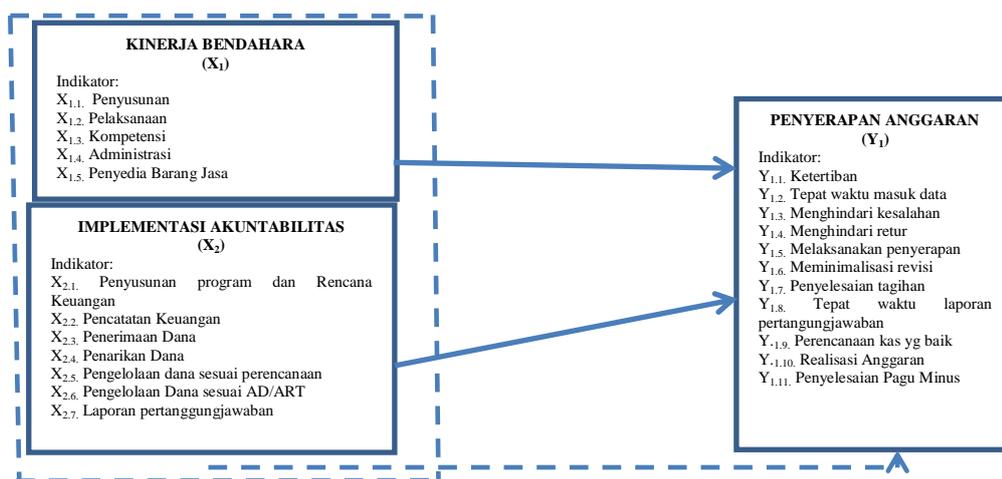
Memahami kinerja keuangan perlu mengidentifikasi factor-faktor yang membangun pengelolaan keuangan daerah. Teori-teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dikemukakan oleh Dharma (2005) bahwa faktor-faktor tingkat kinerja staf meliputi: mutu pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektifitas biaya dan inisiatif. Sementara karakteristik individu yang mempengaruhi kinerja meliputi: umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja (rekan kerja, atasan, organisasi, penghargaan dan imbalan).

Sucipto (2013) menyatakan terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan perilaku yaitu:

1. Variabel individu yang meliputi kemampuan dan keterampilan, fisik maupun mental, latar belakang, pengalaman dan demografi, umur dan jenis kelamin, asal usul dan sebagainya. Kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu, sedangkan demografi mempunyai hubungan tidak langsung pada perilaku dan kinerja,
2. Variabel organisasi, yakni sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.
3. Variabel psikologis, yakni persepsi, sikap, kepribadian, belajar, kepuasan kerja dan motivasi. Persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur serta kesempatan tentang pengertiannya sukar dicapai, karena seseorang individu masuk dan bergabung kedalam suatu organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang, budaya dan ketrampilan yang berbeda satu sama lainnya.

## METODE PENELITIAN

Kerangka pemikiran untuk mendukung penelitian ini, secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2  
Kerangka Pikir Penelitian

## Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>0</sub>. Bahwa kinerja bendahara berpengaruh pada penyerapan anggaran Dinas Sosial Kota Jayapura di Provinsi Papua.
- H<sub>1</sub>. Bahwa Implementasi Akuntabilitas berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Sosial Kota Jayapura di Provinsi Papua.
- H<sub>2</sub>. Bahwa kinerja bendahara dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Dinas Sosial Kota Jayapura di Provinsi Papua.

## Definisi Operasional

Agar terdapat pemahaman dan persepsi yang sama terhadap penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka dikemukakan batasan-batasan definisi operasional yang akan dipakai sebagai acuan sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran Belanja adalah Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dengan indikator-indikator meliputi:
  - a) *ketertiban dalam pengelolaan uang persediaan,*
  - b) *tepat waktu pemasukan data kontrak,*
  - c) *menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Mencairkan (SPM),*
  - d) *Menghindari Retur SP2D,*
  - e) *melaksanakan penyerapan sesuai target yang telah di tetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA),*
  - f) *menghindari/meminimalisir revisi DIPA,*
  - g) *penyelesaian tagihan tepat waktu,*
  - h) *tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara,*
  - i) *membuat perencanaan kas yang baik,*
  - j) *realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan,*
  - k) *penyelesaian terhadap pagu minus belanja pegawai dan menghindari dispensasi SPM.*
2. Implementasi Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a) Pencatatan Keuangan adalah proses transaksi harus dicatat dengan baik sesuai dengan pos-pos keuangan
  - b) Penerimaan Dana adalah mengelola dengan baik penerimaan dana dalam organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber penerimaan untuk tujuan mendapatkan hasil kerja yang maksimal
  - c) Penarikan Dana adalah mengelola keuangan dengan mencatat biaya-biaya yang dibutuhkan dan penggunaan operasional
  - d) Pengelolaan dana sesuai perencanaan adalah semua dana yang diterima dan digunakan dalam operasional keuangan harus sesuai dengan kesepakatan dalam rencana organisasi yang sudah ditetapkan.
  - e) Pengelolaan Dana sesuai AD/ART adalah setiap pengelolaan dana dan anggaran harus sesuai dengan kesepakatan organisasi yang tertuang dalam perencanaan
  - f) Laporan pertanggungjawaban adalah semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus mampu dijelaskan dengan transparan.
3. Kinerja bendahara adalah kemampuan bendahara bekerja sama dengan pengelola keuangan dalam hal ini adalah kepala bagian keuangan dimana bendahara mampu menyusun dan melaksanakan penyerapan anggaran dengan tepat waktu Bersama Kepala Bagian Keuangan, dimana ketepatan dalam pengelolaan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten.
 

Beberapa permasalahan sering terjadi yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh kinerja bendahara dalam pengelolaan anggaran, dimana indikator-indikator dari kinerja bendahara terdiri dari:

  - a) Penyusunan rencana anggaran
  - b) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
  - c) Kompetensi Sumber Daya Manusia
  - d) Administrasi.
  - e) Penyedia Barang/Jasa.

Tabel 1 Pengukuran Variabel Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	SKALA PENGUKURAN
1. Kinerja bendahara ( $X_1$ )	Penyusunan	1 2 3 4 5
	Pelaksanaan	1 2 3 4 5
	Kompetensi	
	Administrasi	
	Penyedia Barang dan Jasa	1 2 3 4 5
		1 2 3 4 5

2. Implementasi Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	Penyusunan program dan Rencana Keuangan	1 2 3 4 5
	Pencatatan Keuangan	1 2 3 4 5
	Penerimaan Dana	1 2 3 4 5
	Penarikan Dana	1 2 3 4 5
	Pengelolaan dana sesuai perencanaan	1 2 3 4 5
3. Penyerapan Anggaran (Y <sub>1</sub> )	Pengelolaan Dana sesuai AD/ART	1 2 3 4 5
	Laporan pertanggungjawaban	1 2 3 4 5
	Ketertiban	1 2 3 4 5
	Tepat waktu masuk data	1 2 3 4 5
	Menghindari kesalahan	1 2 3 4 5
	Menghindari retur	1 2 3 4 5
	Melaksanakan penyerapan	1 2 3 4 5
	Meminimalisasi revisi	1 2 3 4 5
	Penyelesaian tagihan	1 2 3 4 5
Tepat waktu laporan pertanggungjawaban	1 2 3 4 5	
Perencanaan kas yang baik	1 2 3 4 5	
Realisasi anggaran	1 2 3 4 5	
Penyelesaian pagu minus	1 2 3 4 5	

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua dengan obyek penelitian adalah seluruh pengguna dan penerima manfaat anggaran belanja di lingkungan Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua yang berjumlah 95 orang.

### Hasil dan Pembahasan

Pengujian instrumen penelitian dilakukan terhadap indikator-indikator dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, agar dapat diketahui tingkat kevalidan dan keandalan indikator sebagai alat ukur variabel. Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator dari masing-masing variabel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung dan  $r$  tabel. Nilai  $r$  hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel yang dianalisis dengan program spss dan outputnya bernama *corrected item correlation*. Sedangkan uji Reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi suatu pengukuran dari suatu variabel. Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabilitas apabila memiliki koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 (Nunnally, 1967).

Hasil pengujian Validitas dan Reliabilitas dengan menggunakan program SPSS Versi 20 dari masing-masing variabel penelitian yang meliputi Kinerja Bendahara (X<sub>1</sub>), Implementasi Akuntabilitas (X<sub>2</sub>), dan Penyerapan Anggaran (Y) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Uji Validitas dan Reliabilitas: Kinerja Bendahara (X<sub>1</sub>)**

Validity Statistics				Reliability Statistics		
	Sig	Std. Deviation	N	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
X1.1	.000	.62926	95	.588	.583	5
X1.2	.000	.69601	95			
X1.3	.000	.66289	95			
X1.4	.000	.53185	95			
X1.5	.000	.68171	95			

**Tabel.5.4**  
**Uji Validitas dan Reliabilitas: Implementasi Akuntabilitas(X<sub>2</sub>)**

Validity Statistics				Reliability Statistics		
	Sig	Std. Deviation	N	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
X2.1	.000	.57320	95	.753	.752	7
X2.2	.000	.61486	95			
X2.3	.000	.59430	95			
X2.4	.000	.60937	95			
X2.5	.000	.67544	95			
X2.6	.000	.53185	95			
X2.7	.000	.68171	95			

**Tabel 3**  
**Uji Validitas dan Reliabilitas: Penyerapan Anggaran (Y<sub>1</sub>)**

Validity Statistics				Reliability Statistics		
	Sig	Std. Deviation	N	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Y1.1	.000	.55291	95	.837	.845	11
Y1.2	.000	.62515	95			
Y1.3	.000	.63985	95			
Y1.4	.000	.82146	95			
Y1.5	.000	.95263	95			
Y1.6	.000	.69666	95			
Y1.7	.000	.57631	95			
Y1.8	.000	.63880	95			
Y1.9	.000	.91436	95			
Y1.10	.000	.87173	95			
Y1.11	.000	.55291	95			

Sumber: Lampiran SPSS Tahun 2020

Hasil analisis validitas Penyerapan Anggaran (Y), Kinerja Bendahara (X<sub>1</sub>), Implementasi Akuntabilitas (X<sub>2</sub>) semua variabel menunjukkan bahwa nilai r untuk item-item pertanyaan dari masing-masing indikator Penyerapan Anggaran, indikator Kinerja Bendahara, indikator Implementasi Akuntabilitas nilainya lebih besar dari 0,3 dan dan reabilitas Nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,6. Hasil uji validitas dan reabilitas tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk keempat variabel dalam penelitian ini adalah *valid dan reliable*, maka dapat digunakan sebagai intrumen dalam penelitian ini.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

##### a. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang signifikan yang mendekati sempurna antar variabel independen. Jika antar sesama variabel independen terdapat korelasi yang signifikan, maka pada model regresi linear tersebut terdapat gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat multikolinearitas. Tabel berikut ini menyajikan hasil pengujian multikoleniaritas:

**Tabel 4**  
**Descriptive Statistics**

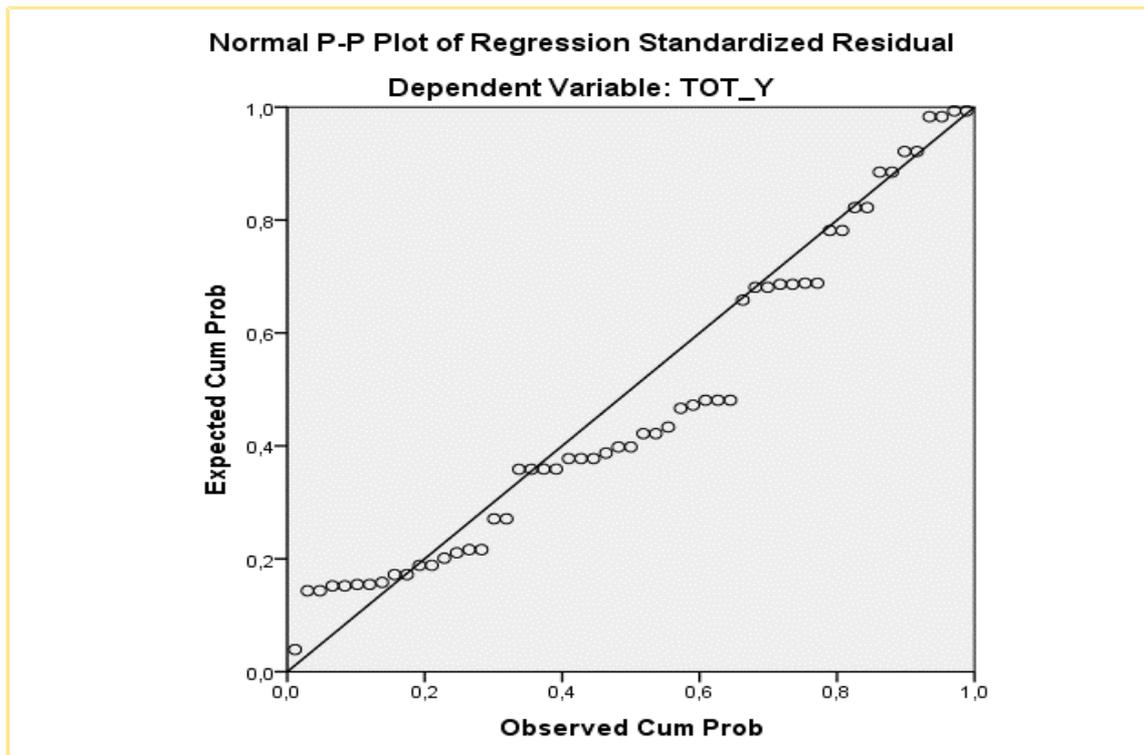
	Tolerance	Correlations	N
Kinerja Bendahara	.8632	1.97651	95
Akuntabilitas	.4842	2.72445	95
Penyerapan Anggaran	.7579	4.93083	95

Sumber: Lampiran SPSS

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas, dimana hasil perhitungan nilai toleransi untuk ketiga variabel bebas yaitu kepemimpinan dan Kinerja Bendahara, dan Implementasi Akuntabilitas tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 0,1 serta nilai korelasi untuk ketiga variabel tersebut tidak ada yang lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

#### b. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

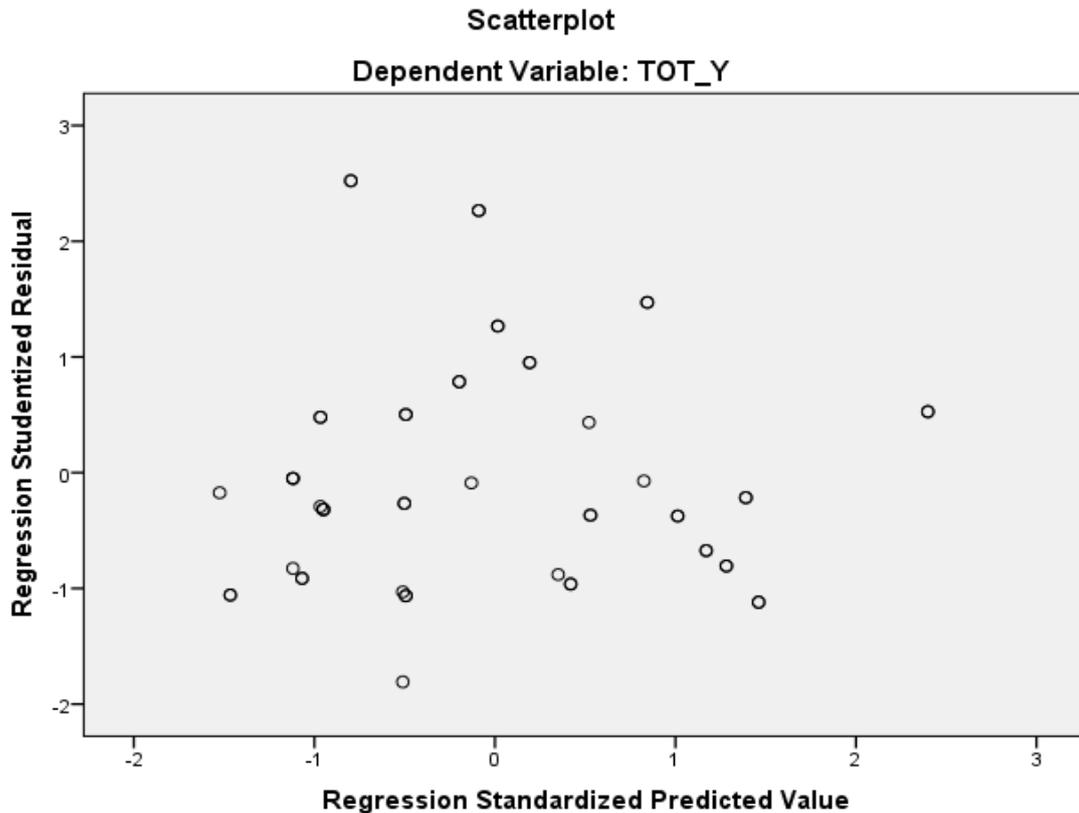


**Gambar 2**  
**Uji Normalitas**  
**Sumber: Lampiran SPSS**

Berdasarkan hasil tampilan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa variance dari residual yang muncul dalam fungsi regresi adalah homokedastisitas, yaitu terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Gujarati, 2012). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (scatterplot) antara nilai prediksi variabel terkait (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*). Berikut ini grafik hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 3  
Uji Heteroskedastisitas  
Sumber: Lampiran SPSS

Hasil grafik *Scatterplot* yang tersaji memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y, serta tidak mempunyai pola yang jelas atau tidak membentuk suatu pola. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai sebagai alat prediksi.

#### d. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilihat pada tabel *critical values of the Durbin-Watson test statistic*. Dari tabel *critical values of the Durbin-Watson test statistic* untuk diketahui bahwa angka Durbin-Watson diperoleh sebesar 1,405. Nilai ini berada di daerah tidak ada autokorelasi seperti nampak pada tabel berikut.

Tabel 5  
Uji Autokorelasi

#### *Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 <sup>a</sup>	.722	.706	1,32189

Sumber: Lampiran SPSS

Uji autokorelasi, dimana nilai durbin-waston dari perhitungan SPSS V. 20, diperoleh sebesar 1,32189. Nilai ini berada pada daerah tidak ada autokorelasi pada tabel 5.5 daerah kritis *durbin-waston*. Hal ini, menunjukkan tidak terdapat adanya autokorelasi antara variabel bebas.

Dari hasil pengujian asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menyalahi syarat asumsi klasik yang ada, dengan demikian model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan.

#### Pengujian Hipotesis

### a. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh faktor-faktor besar secara bersama-sama (simultan) terhadap factor dependen dilakukan dengan menggunakan uji F test yaitu dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel atau probabilitas nilai signifikan dibandingkan dengan alpha yang digunakan dalam penelitian ini 5% atau 0,05.

Tabel 6  
Uji F (Simultan)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 <sup>a</sup>	.722	.706	1,32189

Sumber : Sumber : Lampiran SPSS

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 85,00 lebih besar dari  $F_{tabel} = 2,775$  dan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua terbukti dan diterima. Maka pernyataan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H<sub>2</sub>. Kinerja bendahara dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua Diterima.  
Ha. Kinerja bendahara dan akuntabilitas secara simultan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua Ditolak.

### b. Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor independent secara terpisah atau sendiri-sendiri terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji *t* yaitu dengan cara membandingkan antara *t* hitung dengan *t* tabel atau probabilitas nilai signifikan dibandingkan dengan alpha yang digunakan dalam penelitian yaitu 5% atau 0,05. Hasil uji *t* dengan menggunakan program SPSS V.20, sebagai berikut.

Tabel 7  
Uji *t* (Parsial)  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.631	4.885		4.838	.000
Kinerja Bendahara	.646	.314	.259	2.056	.043
Akuntabilitas	.358	.228	.143	1.332	.061

Dari hasil perhitungan statistic pengaruh parsial antara variable X<sub>1</sub> Kinerja Bendahara dan variable X<sub>2</sub> Implementasi Akuntabilitas terhadap Penyerapan anggaran Y dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh parsial variabel Kinerja Bendahara (X<sub>1</sub>) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y) pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua yang ditunjukkan pada Tabel 5.11.

Dari data perhitungan diatas menunjukkan bahwa antara "X<sub>1</sub>" terhadap "Y" adanya Pengaruh yang positif, hal tersebut ditunjukkan dengan melihat harga  $r_{hitung}$  (0,646) yang lebih besar dari pada  $r_{tabel}$  (0,266). Dan nilai *t*, dimana *t* hitung (2,056) lebih besar dari pada harga *t* tabel (1,297), Maka pernyataan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- Ha. Kinerja Bendahara tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua ditolak.  
H1a. Kinerja Bendahara terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua diterima.  
b. Pengaruh parsial Faktor Implementasi Akuntabilitas (X<sub>2</sub>) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y) Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua yang ditunjukkan pada Tabel 5.11.

Dari data perhitungan diatas menunjukkan bahwa antara “ $X_2$ ” terhadap “ $Y$ ” adanya Pengaruh yang positif, hal tersebut ditunjukkan dengan melihat harga  $r_{hitung}$  (0,358) yang lebih besar dari pada  $r_{table}$  (0,266). Dan nilai  $t$ , dimana  $t_{hitung}$  (1,332) lebih besar dari pada harga  $t_{table}$  (1,297),

Maka pernyataan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- Ha. Implementasi akuntabilitas tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua ditolak.
- H1b. Kinerja Bendahara terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua diterima.

## Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kinerja Bendahara ( $X_1$ ), dan Implementasi Akuntabilitas ( $X_2$ ) secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua. Hasil ini menunjukkan bahwa Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas secara bersama terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua.

Hasil ini didukung oleh nilai koefisien korelasi sebesar 85%. Yang menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang sangat kuat dan bersifat positif. Pengaruh positif artinya penyerapan anggaran akan bertambah baik jika faktor Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas bertambah baik.

Sedangkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,722 atau 72,2%, hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas, dapat menjelaskan ataupun menunjukkan pengaruhnya terhadap Penyerapan Anggaran sebesar 72,2%, sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar dari penelitian ini.

Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua, dibentuk dari kedua faktor tersebut yaitu Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas. Maka faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian yang penuh atau serius dari Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua dalam mengatur dan mengelola para Aparatur Sipil Negara, dalam mengelola anggaran sehingga penyerapan anggaran lebih baik dengan menghasilkan kinerja keuangan yang sesuai apa yang diharapkan.

Maka hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Meyulinda Aviana Elim (2018) dimana faktor Independen kinerja bendahara ( $X_1$ ) dengan indikator-Indikator perencanaan anggaran ( $X_{1.1}$ ), pelaksanaan anggaran ( $X_{1.2}$ ), pengadaan barang dan jasa ( $X_{1.3}$ ), komitmen manajemen ( $X_{1.4}$ ), lingkungan dan birokrasi ( $X_{1.5}$ ), sedangkan satu variabel dependen adalah penyerapan anggaran ( $Y$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa Kinerja Bendahara ( $X_1$ ) secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran ( $Y$ ) pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua, hasil ini menunjukkan bahwa jika Kinerja Bendahara bertambah baik maka dapat meningkatkan Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua, hasil ini didukung oleh nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,646.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Meyulinda Aviana Elim (2018) dan Zulaikah (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa; secara parsial Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Dan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa faktor Kinerja Bendahara berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

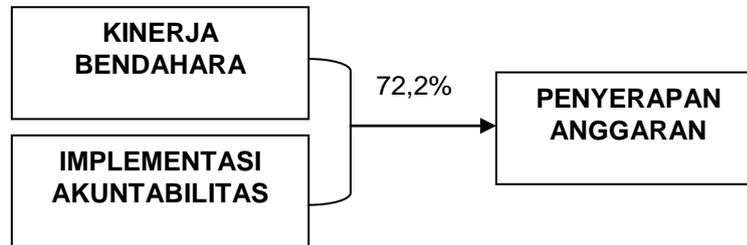
Hasil pengujian parsial berikutnya menunjukkan bahwa Implementasi Akuntabilitas secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua, hasil ini menunjukkan bahwa jika Implementasi Akuntabilitas bertambah baik maka dapat meningkatkan Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua, hasil ini didukung oleh nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,358.

Hasil diatas menunjukkan bahwa kinerja bendahara harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sehingga mampu melaksanakan penyerapan anggaran yang baik pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara parsial pada kedua variabel yaitu variabel Kinerja Bendahara ( $X_1$ ) dan Variabel Implementasi Akuntabilitas terhadap penyerapan anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua. Maka dari hasil analisis statistic menunjukkan variabel dominan atau variable yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua adalah variable Kinerja Bendahara. Didasarkan pada hasil pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa variabel yang memiliki nilai koefisien *standardize* beta terbesar adalah variabel Kinerja Bendahara sebesar 0,646 dan nilai korelasi parsial sebesar 2,056, nilai-nilai ini lebih besar di banding yang diperoleh variabel Implementasi Akuntabilitas.

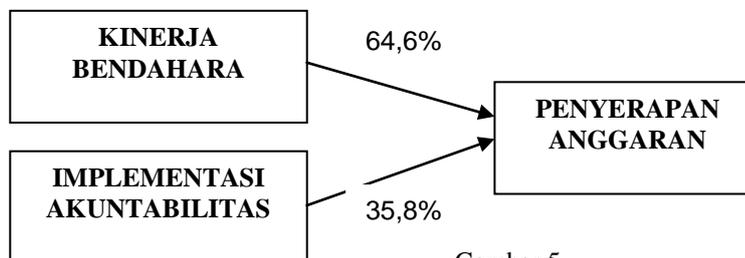
Oleh karena itu Kinerja Bendahara yang ada pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua perlu mendapatkan perhatian dan ditingkatkan sehingga mampu mengelola anggaran dengan baik untuk mencapai prestasi dalam penyerapan anggran yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan model penelitian sebagai berikut:

a. Model Penelitian Simultan



Gambar 4  
Model Penelitian secara Simultan

b. Model Penelitian Parsial



Gambar 5.  
Model Penelitian secara Parsial

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada gambar diatas maka penelitian ini mendukung dari teori Menurut Halim (2014) Penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas. Penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada gambar 5 diatas hasil penelitian ini sejalan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN, 2018) dan Meyulinda (2018) menjelaskan kinerja bendahara dalam perannya selaku kuasa Bendahara Umum Negara tidak sekedar menyalurkan dana APBN sesuai permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran, namun lebih dari itu Ditjen PBN juga harus memastikan agar dana yang telah dianggarkan dalam APBN dapat terserap sesuai perencanaannya.

## KESIMPULAN

Secara bersama-sama faktor-faktor Kinerja Bendahara dan Implementasi Akuntabilitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua. Artinya jika kedua variabel tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik maka mampu memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran dan dapat meningkatkan Penyerapan Anggaran semakin lebih baik kedepannya.

Secara parsial faktor-faktor Bendahara berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran terutama pada indikator perencanaan dimana diharapkan perencanaan keuangan yang dilakukan bendahara harus lebih baik ke depan.

Implementasi Akuntabilitas menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua.

## SARAN

Penyerapan anggran pada Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua perlu dilakukan peningkatan pada kinerja dan akuntabilitas secara bersama-sama kepada Bendahara sehingga dalam aktivitas

kegiatan penyelenggaraan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk peningkatan kompetensi bendahara pada Kinerja khususnya indikator Perencanaan untuk mendapat perhatian lebih baik dimana dilakukan pendidikan dan pelatihan atau workshp.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban', 14(1), pp. 1–18. Available at: jurnal.untag. sbj.
- Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Pustaka Pelajar. Jakarta
- Elim, Meyulinda Aviana dan Yusfarita. 2010. Pengaruh Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan Penjualan, dan Return on Asset terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur diBEJ. Jurnal EFEKTIF Vol. I / No. 1 Juni.
- Gujarati, N. D. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba.
- Halim. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi publik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ledvina V. Carino. 2004. Organization and Management in The Public Sector, Alih Bahasa. Jakarta:Grasindo.
- Nunnally, J., 1967. *Psychometric Theory*, McGraw Hill, New York.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2018, tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Pada Kementerian Negara/ Lembaga
- Sucipto, 2013, "Penilaian Kinerja Keuangan", Jurnal Ekonomi & Bisnis, FE Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara
- Zulaikha. 2018. Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment. (Sebuah Kajian Eksperimental Dalam Audit Saldo Akun Persediaan).SNA 9 Padang.